

MEMBANGUN PEMAHAMAN MULTIKULTURALISME : PERSPEKTIF ARKEOLOGI[©]

Daud Aris Tanudirjo

Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Pengantar

Akhir-akhir ini kata “multikulturalisme” dan “pluralisme” sering terlontar di ranah publik. Gejala ini dapat dipahami, jika mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang semakin terjebak dalam berbagai konflik dan peningkatan radikalisme. Dalam situasi seperti itu, kedua kata di atas memang selalu dirapalkan bak mantra yang diharapkan mampu meredakan kegerahan akan hiruk-pikuk perbedaan dan meredam dorongan untuk menang sendiri. Namun, apakah keduanya akan dapat memenuhi harapan itu, tentu akan sangat terkait dengan pemahaman akan kedua konsep tersebut. Barangkali, ada yang berpendapat bahwa kedua konsep itu bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak negara RI didirikan lebih dari enam puluh lima tahun yang lalu konsep-konsep itu telah ada dan seringkali dikaitkan dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang diartikan “berbeda-beda tetapi tetap satu adanya”. Namun, perlu disadari bahwa tafsir makna akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia sendiri maupun dunia. Karena itu, rasanya kini merupakan saat yang cukup tepat untuk mengkaji dan memahami kembali konsep tentang multikulturalisme dan pluralisme dalam konteks Indonesia sekarang.

Mungkin istilah pluralisme agak lebih mudah dirumuskan dibandingkan multikulturalisme. Pluralisme merujuk pada keadaan masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, agama, asal, dan latarbelakang budaya. Yang terpenting di sini adalah adanya keragaman atau kemajemukan, tanpa melihat interaksi di antara mereka. Ini hanya memenuhi unsur “*bhinneka*” semata, tidak mengandung unsur “*tunggal*”, yang sesungguhnya menyiratkan adanya sifat hubungan antara yang beragam ini, yaitu kesatuan.

Sementara itu, istilah “multikulturalisme” tidak mudah dipahami, karena sesungguhnya ia adalah konsep politik, khususnya politik identitas, karena itu mempunyai berbagai makna yang dapat dikaitkan dengan konteks penggunaannya (*Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2010). Multikulturalisme berbeda dengan multikultural yang diartikan “berbagai budaya”, karena multikulturalisme sebenarnya muncul sebagai kebijakan pemerintah dalam memperlakukan warganya. Istilah ini pertamakali dipopulerkan oleh pemerintah Kanada pada tahun 1965 untuk menjamin kesetaraan kedudukan warganegaranya. Disebutkan, multikulturalisme lahir dari keyakinan bahwa setiap warganegara itu sama kedudukannya. Multikulturalisme menjamin setiap warga dapat mempertahankan jati dirinya (*identity*), bangga terhadap nenek moyangnya (*ancestry*), dan mempunyai rasa miliknya (*sense of belonging*). Konsep ini dipandang sebagai gerakan sosial alternatif terhadap kebijakan asimilasi. Gerakan ini merupakan penegasan dalam menghargai keragaman budaya terutama dari kelompok minoritas yang selama ini tersisihkan. Selanjutnya, istilah ini lalu banyak dipergunakan di Australia dan negara lain sejak 1970-an (Bennet et als., 2005). Jadi, dari konteks kesejarahan Indonesia jauh lebih dulu menyadari, menghargai dan bahkan menggunakan paham multikulturalisme dibanding bangsa-bangsa lain. Sejak Indonesia merdeka, negara ini telah menunjukkan politik identitas Bhinneka Tunggal Ika, yang maknanya tidak berbeda jauh dengan konsep multikulturalisme yang muncul di negara-negara barat.

Sebagai konsep politik, multikulturalisme bukan hanya merujuk pada keragaman ‘budaya’ tetapi juga keragaman dalam agama, etnis, ras, dan bahasa, bahkan juga mayoritas dan minoritas. Dalam konsep ini ada semangat untuk mengangkat kembali harkat orang-orang yang selama ini

jatidirinya tak-dihargai dan mencoba mengubah pola hubungan dan komunikasi yang selama ini telah meminggirkan kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks ini, multikulturalisme lalu terkait dan membawa dampak pada kepentingan ekonomi maupun politik, di antaranya adalah tuntutan memperbaiki kedudukan ekonomi dan politis dari kelompok yang tidak diuntungkan karena status mereka yang 'dibedakan' atau minoritas (*Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2010).

Dari uraian di atas, jelas bahwa multikulturalisme adalah salah bentuk kebijakan dalam menghadapi masyarakat yang beragam atau plural. Namun, berhadapan dengan perbedaan, setiap paham akan bereaksi secara berbeda pula. Menurut Ashworth et als (2005), setidaknya ada lima variasi kebijakan dalam menghadapi perbedaan itu (lihat tabel di bawah).

	<p>Inti Tunggal Asimilasi/Integrasi</p>	<p>Masyarakat hanya mengakui adanya satu budaya yang asli di tempat itu, yang lain harus melebur dalam budaya itu, baik melalui proses :</p> <p>(a) asimilasi : pendatang/minoritas mengubah sesuai dengan yang asli/mayoritas),</p> <p>(b) integrasi : yang terdiri dari dua proses yaitu <i>integrasi fungsional</i> dan <i>akulturasi</i></p> <p>nb : <i>integrasi fungsional</i> : pendatang diterima karena dapat menyesuaikan diri dalam fungsi-fungsi tertentu dari budaya penerima. Ini dapat menjadi langkah perantara menuju ke proses <i>akulturasi</i>, yaitu penyerapan unsur asing ke dalam suatu budaya tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli</p>	
	<p>Inti +</p>	<p>Budaya inti yang dominan dikelilingi oleh budaya-budaya yang minoritas. Budaya minoritas biasanya menerima dominasi dan tidak menuntut disejajarkan dengan budaya dominan karena menyadari akar sejarah, jumlah pendukung, dan kekuatan politik budaya dominan. Kondisi ini tercipta karena : (i) masyarakat demokratis dengan budaya telah mapan (inti, <i>leitkultur</i>) kemudian harus mengakomodasi beragam budaya lain akibat kedatangan migran baru, (ii) masyarakat dengan beragam budaya baru lepas dari penjajahan (pasca-kolonial) dan sedang dalam proses membangun bangsa baru (national building) namun didalamnya ada satu budaya mayoritas.</p>	
	<p>Wadah pelebur (Melting pot)</p>	<p>Berbagai budaya yang ada melebur menjadi satu budaya yang memiliki ciri dan nilai-nilai yang sama sekali baru, sehingga ciri-ciri budaya yang melebur di dalamnya sulit dikenali lagi. Proses ini pun pasti akan menghasilkan budaya tunggal. Ada tiga situasi penyebab : (i) telah mengalami berbagai pengaruh budaya asing akibat migrasi berbagai komunitas dan membutuhkan identitas budaya (nasional) yang baru sama sekali, khususnya pasca-kolonial, (ii) berbagai kelompok dengan budaya berbeda tiba-tiba harus menjadi satu "bangsa" baru, dan (iii) suatu pemerintah menginginkan peleburan berbagai budaya pendukung untuk memberi tempat bagi ideologi (baru) bersama, melalui rekayasa sosial</p>	

<p>Tiang Penyangga (Pillar)</p>	<p>Dalam model ini, suatu bangun masyarakat (negara) dibayangkan ditopang oleh sejumlah pilar budaya yang berdiri secara mandiri. Setiap pilar budaya tidak terlalu banyak memiliki hubungan dengan pilar budaya lainnya, namun secara bersama-sama mendukung keberadaan bangunan bersama itu yang sedikit menuntut keragaman. Karena itu, setiap komunitas pendukung dapat mengatur sendiri budaya, sosial, pendidikan, politik, dan perekonomian mereka sendiri. Di sini, tidak ada kelompok yang diistimewakan, semua setara.</p>
<p>Gado-gado (Salad Bowl) Pelangi Mozaik</p>	<p>Masyarakat mengakomodasi beragam budaya yang bercampur menciptakan kesatuan budaya tanpa kehilangan masing-masing ciri budayanya, sehingga diibaratkan gado-gado atau mangkok salad, pelangi, atau mozaik. Berbeda dengan “kowi”, percampuran ini masih akan menampilkan unsur-unsurnya. Keadaan ini secara politis dapat hanya merupakan <i>pengakuan</i> adanya keragaman, tetapi bisa juga menjadi <i>keinginan</i> untuk diwujudkan. Pengakuan akan melihat keragaman sebagai asset budaya yang harus diakui bersama dan saling memperkaya. Keinginan justru secara sadar menekan perbedaan untuk menciptakan atau menemukan ikatan (kohesi) bersama. Persoalannya, apakah mungkin kumpulan beragam budaya itu tidak memiliki elemen yang menyatukan (tanpa bumbu), atau harus ada nilai-nilai bersama yang jadi pengikatnya (dengan bumbu).</p>

Setelah memahami kelima variasi model kebijakan itu, pertanyaannya adalah mana yang sesungguhnya dikehendaki oleh Indonesia untuk mewujudkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” itu ? Menurut Ashworth *et als* (2007), politik identitas Indonesia termasuk mengarah pada model “wadah pelebur tipe kuno” (*archetype melting pot*). Artinya, sebagai masyarakat yang terbentuk dari serangkaian gelombang migrasi di masa lampau serta pernah mengalami kolonisasi Eropa, Indonesia sedang menempa budaya-budaya lama yang beragam menjadi satu budaya baru sebagai identitas bersama. Betulkan model itu yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia ? Analisis Ashworth dan kawan-kawan mungkin memang benar kalau mereka mendasarkan pada pengamatan selama Orde Baru. Tidak dapat disangkal, banyak kebijakan Orde Baru yang cenderung “menyeragamkan” budaya berbagai kelompok etnis yang ada. Karena itu, tidak heran jika Ashworth *et als* menganggap Indonesia menerapkan politik identitas “wadah pelebur”. Namun, apakah model wadah pelebur seperti itu yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia ketika bersepakat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ? Barangkali, arkeologi dapat ikut membantu menjawab masalah ini.

Relevansi Arkeologi

Lalu, bagaimana Arkeologi dapat membantu menjawab masalah multikulturalisme di Indonesia ini ? Memang harus diakui, sesungguhnya tidak mudah bagi Arkeologi untuk menjawab pertanyaan itu. Namun, sebagaimana dikemukakan Ashworth *et als* (2007), keberagaman budaya (multikulturalisme) di Indonesia adalah akibat perjalanan panjang sejarahnya yang ditandai dengan gelombang-gelombang migrasi dan difusi budaya ke wilayah Nusantara. Karena itu, untuk menjawab masalah keberagaman budaya di Indonesia dibutuhkan pelacakan sejarah budaya di kawasan ini. Di sinilah Arkeologi dapat memberikan sumbangan yang utama. Sebagaimana dinyatakan oleh Hodder (1987), Arkeologi dapat berperan sebagai sejarah jangka panjang (*archaeology as long term history*). Dengan kemampuannya meretas ke masa yang amat silam

(*remote past*), arkeologi dapat mengungkapkan perubahan-perubahan yang berlangsung lama dan bertahap, yang sulit dilacak oleh bidang ilmu lainnya. Meskipun Arkeologi lebih banyak melakukan kajian pada budaya bendawi, seperangkat metode yang diterapkannya ternyata mampu mengungkap fenomena multikulturalisme di masa lampau, di antaranya melalui analisis terhadap kesamaan dan perbedaan benda dan atribut benda yang merupakan representasi dari setiap budaya. Karena itu, arkeologi akan memilah-milah data yang dikajinya sehingga diperoleh pola pengelompokan yang bersifat politetik. Artinya, jika beberapa himpunan yang berisi artefak dengan atribut tertentu saling dibandingkan, maka akan terlihat beberapa ciri yang sama sementara beberapa ciri lainnya hanya terdapat pada himpunan tertentu (Clarke, 1968; Osborn, 1989). Hal ini setidaknya menyiratkan ada unsur-unsur budaya tertentu yang dimiliki bersama, sedangkan unsur-unsur khas yang menjadi identitas khusus budaya itu tetap dipertahankan dan tidak lebur.

Selain itu, berdasarkan kajian arkeologis terhadap agama-agama besar di dunia, Insoll (2001) berani menyatakan salah satu peran penting arkeologi adalah kemampuannya memberikan sumbangan bagi pemahaman perkembangan agama dan kepercayaan, antara lain berkaitan dengan sinkretisme, co-existence, adaptasi, dan tradisi keagamaan yang populer dalam suatu masyarakat. Agama merupakan salah satu unsur pembeda yang cukup rawan dalam masyarakat multikultural (*Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2010), sehingga amat perlu untuk dipelajari dalam memahami multikulturalisme.

Dengan kemampuannya melacak hingga jauh Arkeologi akan dapat menemukan “nilai-nilai inti” (*core values*) budaya-budaya yang berkembang di wilayah yang kini disebut Indonesia. Konsep “nilai-nilai inti” suatu budaya awalnya dikemukakan oleh Francis Hsu, seorang antropolog kondang, untuk merujuk “nilai-nilai yang secara khusus dianut dan diunggulkan oleh suatu budaya, dihasilkan dari kesepakatan bersama, dan dijadikan identitas budaya suatu masyarakat”. (Koentjaraningrat, 1976). Begitu penting dan lekatnya unsur “nilai-nilai inti” itu pada masyarakat, sehingga unsur ini diletakkan sebagai inti kebudayaan dan menjadi wujud keempat kebudayaan yang disebut sebagai “gagasan ideologis”. Wujud budaya inilah yang akan menentukan corak pikiran, cara berpikir, tindakan, dan akhirnya hasil budaya bendawinya (Koentjaraningrat, 2005).

Sekilas Jejak Multikulturalisme di Indonesia

Penelitian-penelitian arkeologi yang panjang, telah menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di Kepulauan Nusantara selalu memiliki beragam budaya. Keragaman budaya ini seakan telah menjadi fitrahnya karena tiga faktor. Pertama, lingkungan alam kawasan ini cukup beragam sehingga setiap komunitas akan menciptakan budaya yang berbeda dalam rangka beradaptasi pada lingkungannya. Kedua, lokasi kepulauan yang strategis telah menjadikan kawasan ini sebagai tempat tujuan dan pelintasan migrasi, sehingga menjadi tempat persilangan beragam budaya. Ketiga, dua kondisi tadi menyebabkan masyarakat yang tinggal di kawasan ini mengalami evolusi budaya pada tingkat yang berbeda-beda dan menjadi semakin beragam karena dipadu dengan hasil difusi budaya. Dengan mekanisme ini terbentuk budaya-budaya lokal yang begitu beragam tetapi diantaranya memiliki nilai-nilai inti budaya yang mirip. Itulah pangkal multikulturalisme pada masa prasejarah (Tanudirjo, 2009). Contoh yang menarik sebagai bukti fenomena ini adalah ciri rumpun bahasa Austronesia. Anggota rumpun bahasa yang tersebar amat luas ini mempunyai hubungan yang digambarkan dalam bentuk diagram mirip garu (*rake-like*). Artinya, bahasa-bahasa itu sesungguhnya tidak mengalami perpecahan bahasa (*language split*), tetapi justru mempertahankan hubungan dialek (*dialect linkage*). Situasi ini menunjukkan bahwa walaupun komunitas penuturnya hidup terpisah, tetapi mereka masih memelihara hubungan, sehingga inovasi di suatu tempat akan ditularkan juga ke komunitas lain. Dengan demikian mereka tetap memelihara hubungan dan nilai-nilai inti budaya yang sama (lebih jauh baca Tanudirjo, 2004).

Pada masa pengaruh Hindu (budaya dari India) mulai memasuki Indonesia ada beragam corak budaya yang kemudian berkembang. Di Kutai, prasasti-prasasti yupa yang diterbitkan oleh

Raja Mulawarman menyiratkan konsep megalitik yang berintikan penghargaan tinggi pada leluhur dan keinginan menyejahterakan masyarakat yang berkembang sejak Masa Prasejarah masih tetap dipertahankan meskipun menggunakan lambang-lambang Hindu. Konsep pendirian candi pun tidak sama dengan di India yang diperuntukan pada dewa-dewa, karena di Indonesia candi lebih dipakai sebagai *pendharmaan* (pemuliaan) tokoh atau pemimpin (*raja*) yang dianggap telah berjasa pada rakyat. Tokoh inilah yang lalu diwujudkan sebagai dewa. Jadi, meskipun wadah keagamaan berbeda, tetapi 'nilai-nilai inti budaya'-nya tetap bertahan.

Tebaran bukti arkeologis berupa artefak, bangunan, dan situs masa pengaruh Hindu menunjukkan para pemeluk agama Hindu dan Budha, dengan berbagai sekte-nya, hidup berdampingan tanpa masalah. Candi Prambanan yang Hinduistik dan Candi Sewu yang Budhistik didirikan secara berdampingan dan bahkan saling melengkapi. Bahkan, saling dukung antara penganut Hindu dan Budha terabadikan pada Candi Plaosan. Sejumlah prasasti pendek yang ditemukan di kompleks percandian ini menunjukkan penganut Hindu menyumbangkan candi perwara bagi percandian Budhistik ini. Candi Borobudur yang megah menunjukkan juga unsur-unsur pemujaan leluhur dan pendidikan pentingnya sikap yang tidak mengutamakan unsur bendawi (materialisme) sebagai wujud dari nilai-nilai inti budaya yang terus dipertahankan (Joesoef, 2004).

Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang dikenal memiliki perguruan tinggi Budhis terbesar di Asia Tenggara, justru ditopang oleh masyarakat yang sebagian besar bukan pemeluk agama tersebut, tetapi suku-suku murba. Banyak orang asing dari Cina, Arab, dan mungkin India telah singgah, berdagang, dan belajar dengan betah di pelabuhan dan perguruan yang ada. Bahkan, pendeta Budhis dari Cina, It-zhing, tinggal bertahun-tahun di sana (Muljana, 2006-a). Justru, karena sikapnya yang toleran terhadap keragaman budaya, kerajaan Sriwijaya menjadi besar.

Kerajaan besar Majapahit dengan jelas menampilkan diri sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang amat kompleks. Tidak jauh dari pusat kerajaannya, hidup masyarakat yang masih menganut kepercayaan memuja leluhur dan mendirikan bangunan megalitik di sekitar Bondowoso dan Situbondo. Hubungan antar kekuasaan pusat dan daerah yang tersebut di antero Nusantara sangat luwes. Daerah-daerah bawahannya dibiarkan tetap mandiri, meskipun mereka patuh dengan pusat. Temuan-temuan nisan kubur bercorak Islami yang telah digunakan oleh para bangsawan Majapahit sejak masa keemasan Kerajaan Hindu ini, jelas menunjukkan toleransi yang tinggi. Diduga tidak sedikit pejabat Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Bahkan, sebagian jabatan syahbandar diserahkan pada orang Cina atau Arab yang dianggap cakap. Laporan Ma Huan, ajudan Laksamana Zheng-He yang pernah singgah di ibukota Majapahit, melaporkan banyaknya komunitas Cina yang ada di pelabuhan-pelabuhan kerajaan ini. Bahkan, boneka-boneka tanah liat yang ditemukan di situs bekas kota Majapahit di Trowulan, menunjukkan adanya beragam kelompok etnis yang ada di kerajaan ini : Cina, Asia Selatan, Asia Barat, dan mungkin dari Afrika juga. Semua itu menunjukkan politik multikulturalisme yang mantap.

Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian tumbuh berkembang di Nusantara sejak sekitar Abad ke-13 juga terus melanjutkan tradisi multikulturalisme. Toponim yang merujuk nama etnis (Daengan, Bugisan, Pekojan, dll.) pada tata permukiman kota-kota kerajaan Islam jelas menunjukkan politik multikulturalisme. Bahkan, para wali menggunakan sarana-sarana budaya pra-Islam untuk mengenalkan agama itu, di antaranya dengan gamelan dan wayang. Bahkan, kerajaan Islam pertama di Jawa memiliki raja dan pejabat yang beretnis Cina (Graaf dan Pigeaud, 1984). Seni bangunan dan hiasan (Sunyaragi, motif awan) di Kraton Cirebon banyak menyerap unsur-unsur seni Cina (Tjandrasasmita, 200). Bahkan, penggunaan ubin keramik bermotif hias Eropa dengan cerita nasrani pun tidak menjadi masalah digunakan di Cirebon yang Islam. Semua itu menunjukkan begitu tingginya tingkat toleransi masyarakat Islam.

Pengaruh budaya Eropa pun tidak ditinggalkan dalam politik identitas Indonesia. Bahkan, diapresiasi sebagai unsur yang melengkapi. Masuknya agama Kristen dengan tinggalan-tinggalan bangunan gereja dan budaya bendawi bercorak Eropa lainnya diterima dan diadopsi secara wajar. Muncul rumah-rumah bergaya kolonial (jengki), yang memadukan konsep Eropa dan adaptasi

pada lingkungan setempat yang tropis. Sistem pendidikan Eropa pun diterima sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga akhirnya membawa para pelajar Indonesia pada kesadaran akan perlunya hidup berbangsa dan bernegara secara mandiri. Gerakan kebangsaan pun mulai bersemi, sehingga akhirnya mendorong perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Sejarah panjang keberagaman budaya yang tersebar luas mulai disadari perlu disatukan tanpa menghancurkan. Langkah awal dimulai dari Sumpah Pemuda tahun 1928, yang mengikat perbedaan dengan kesepakatan bersama untuk (i) bertumpah darah satu, (ii) berbangsa satu, dan (iii) berbahasa satu. Kesepakatan itu menunjukkan politik identitas yang disepakati justru ingin menghindari model inti tunggal atau inti +, dengan memilih bahasa Melayu yang minoritas sebagai bahasa bersama. Juga tidak ada niatan untuk menghapuskan bahasa-bahasa daerah. Demikian pula dengan konsep kebangsaannya, tidak berarti harus dipimpin oleh etnis mayoritas. Konsep berbangsa satu bukan konsep berdasar **etnis**, tetapi berdasarkan **etis** yaitu nilai-nilai inti budaya yang diakui bersama.

Puncak dari proses menuju persatuan itu terjadi ketika Pancasila digali bersama oleh para *founding fathers* negara Republik Indonesia dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Proses penggalan Pancasila adalah penelusuran dan penemuan nilai-nilai inti budaya (**core values**) yang ada pada budaya-budaya Nusantara. Karena itu, tepatlah jika Pancasila kemudian dijadikan sebagai gagasan ideologis yang menjadikan dasar berpikir, bertindak, dan menghasilkan budaya bendawi. Dengan demikian, semestinya pula multikulturalisme Indonesia adalah multikulturalisme Pancasila.

Pancasila sebagai payung multikulturalisme Indonesia

Dari proses yang dijelaskan di atas, dipahami bahwa secara substansial sesungguhnya Pancasila adalah unsur-unsur kebudayaan seluruh komunitas dan suku-suku bangsa yang ada di Kepulauan Nusantara ini. Dengan kata lain, Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai budaya yang hadir dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia selama beribu tahun dan telah mengalami berbagai ujian dalam proses beradaptasi terhadap lingkungan sosial dan alam. Pancasila merupakan intisari kebudayaan yang berakar jauh di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang begitu beragam, sehingga dapat dikatakan pula telah menjadi watak dan ciri kepribadian budaya bangsa.

Dalam konteks analisis kebudayaan, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat sebagai proses transformasi dari entitas Pancasila sebagai jatidiri budaya dan etnis (*cultural and ethnic identity*) menjadi jatidiri bangsa dan negara (*national identity*). Jatidiri budaya atau etnis pada dasarnya muncul di setiap komunitas atau suku bangsa dan lebih menekankan pada kesinambungan budaya dari masa silam hingga kini, sedangkan jatidiri bangsa-negara lebih menekankan pada munculnya kesadaran akan kebersamaan dalam konteks berbangsa dan bernegara (lebih jauh lihat Tanudirjo, 2007). Proses ini menjadi amat penting karena pada tahap ini Pancasila telah disepakati sebagai ‘pemersatu bangsa dan budaya’ Pancasila menjadi pengikat persatuan dan kesatuan semua komunitas yang telah menyatakan bergabung dalam NKRI.

Pancasila adalah wujud nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman ada dalam setiap sila sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini.

KeTuhanan Yang Maha Esa	Keragaman dalam agama, karena menunjuk satu agama panutan
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	Keragaman ras dan etnis, karena menunjuk pada setiap manusia (siapa saja)
Persatuan Indonesia	Keragaman budaya dan wilayah, karena tidak ada budaya tunggal (inti tunggal atau inti +) atau membedakan asal-usul

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan (demokrasi)	Keragaman pendapat, karena tidak bersifat absolutisme (negara kekuasaan tunggal) dan kedaulatan di tangan rakyat
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Keragaman golongan, tidak ada mayoritas dan minoritas (tetapi semua rakyat)

Semua keragaman dalam setiap sila dalam pelaksanaannya harus dilakukan bersama-sama sebagai satu kesatuan dan tidak boleh dipisahkan sila demi sila. Ketika menjalankan agama, harus mengingat juga pada kemanusiaan, pada persatuan negara-bangsa, demokratis, dan adil bagi yang lain. Ketika menjalankan demokrasi, misalnya, maka bukan demokrasi liberal (individualisme) tetapi harus mengingat pada tuntutan agamanya, rasa kemanusiaannya, demi persatuan bangsa, dan bersikap adil bagi semua orang. Pada dasarnya, setiap sila harus dijalankan dengan berdasarkan keempat sila lainnya. Itulah hakekat dari 'kesatuan' atau 'tunggal' dari Pancasila, yaitu harus dilaksanakan sebagai kesatuan yang tak terpisahkan.

Dengan begitu, multikulturalisme di Indonesia seharusnya mencontoh ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dari Pancasila. Artinya, ketika seseorang memutuskan pilihannya dari keragaman yang ada dan menjalankan pilihannya itu, maka dia harus juga mengingat dan bertenggang rasa dengan orang yang memiliki pilihan berbeda. Tidak berarti, harus ada peleburan sama sekali atau penyeragaman. Konsep yang mirip gagasan ini pernah diungkapkan oleh Daed Joesoef (2004) ketika melihat Borobudur berada di antara bangunan gereja dan mesjid. Ia menyatakan bahwa keberadaan berbagai pengaruh agama di Indonesia dalam perjalanan sejarah Indonesia mencerminkan bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia sejak dulu telah membentuk dirinya sebagai masyarakat dengan penghargaan atas nilai-nilai *universalisme*, *relativisme*, dan lebih dari itu *pluralisme*. Mereka yakin bahwa kesatuan yang didasari ketiga nilai tadi tidak harus dilebur dalam keseragaman budaya atau uniformitas. Karena itu, sejak dulu masyarakat Indonesia selalu mengedepankan apa yang dapat disebut sebagai universalisme pluralis.

Epilog

Demikianlah, pada akhirnya harus disimpulkan bahwa perspektif dari kajian arkeologis dapat membantu menerangkan multikulturalisme Indonesia. Arkeologi sebagai sejarah jangka panjang dapat menemukan jejak-jejak multikulturalisme yang telah lama berkembang di kawasan Nusantara. Jejak-jejak itu menunjukkan arah yang cukup jelas mengarah pada Pancasila sebagai payung multikulturalisme di Indonesia. Bukan multikulturalisme liberal yang berdasarkan pada individualisme, karena multikulturalisme Pancasila harus bersandikan pada Ke-Tuhan-an, kemanusiaan, kebersamaan (kerakyatan), dan keadilan. Multikulturalisme Pancasila juga bukan politik identitas pasca-kolonial untuk menempa identitas baru bagi bangsa yang baru merdeka, karena multikulturalisme itu sudah ada dan sekedar melanjutkan entitas yang telah ada sejak lama dalam wadah yang baru. Multikulturalisme Pancasila adalah multikulturalisme yang khas berdasarkan nilai-nilai inti budaya dengan dimensi yang lengkap, yaitu Tuhan, Manusia, Bangsa, Demokrasi, dan Keadilan. Multikulturalisme Pancasila tidak membutuhkan peleburan budaya atau penyeragaman budaya. Keragaman telah disatukan dalam kesamaan nilai-nilai inti budaya yang telah ditetapkan menjadi ideologi. Upaya pencapaian ideologi itu dapat dilakukan secara bersama dan sinergis tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.

Semoga perspektif arkeologi dalam melihat multikulturalisme di Indonesia ini dapat sedikit memberikan seberkas cahaya untuk menerangi jalan mencari jatidiri multikulturalisme Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ashworth, G.J., B. Graham, and J.E. Tunbridge. 2007. *Pluralising Pasts : Heritage, Identity, and Place in Multicultural Societies*. Pluto Press, London.
- Bennet, T., L. Grossberg, and M. Morris. 2005. *New Keywords : A Revised Vocabulary for Culture and Society*. Blackwell. Hlm. 226 – 230.
- Clarke, D.L. 1968. *Analytical Archaeology*. Methuen, London.
- Graaf, H.J. de dan Th.G. Th. Pigeaud. 1984. *Chinese Muslims in Java in the 15th – 16th Centuries. Monash Paper on Southeast Asia no. 6*. Melbourne.
- Hodder, I. 1987. The contribution of long-term, dalam I. Hodder (ed.), *Archaeology as long-term history*. Cambridge University Press, London. Hlm. 1 – 9.
- Insoll, T. 2001. Introduction : the Archaeology of world religion, dalam T. Insoll (ed.), *Archaeology and World Religion*. Routledge, London. Hlm. 1 – 32
- Joesoef, D. 2004. *Borobudur*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi*, Jilid I. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muljana, S. 2006. *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama*. LKiS, Jakarta.
- Muljana, S. 2006-a. *Sriwijaya*. LKiS, Jakarta
- Osborn, A. 1989. Multiculturalism in the Eastern Andes, dalam S. Shennan (ed.), *Archaeological Approaches to Cultural Identity*. Unwin Hyman, London. Hlm. 141 – 156
- Tanudirjo, D.A. 2004. The Structure of Austronesian Migration into Island Southeast Asia and Oceania, dalam V. Paz (ed.) *Southeast Asian Archaeology*, Wilhelm G. Solheim II Festschrift, hlm. 83-103
- Tanudirjo, D.A. , B. Sulistyanto, dan B. Prasetyo. 2009. Prasejarah dalam Perspektif Masa Lalu, Kini, dan Mendatang, dalam T. Abdullah (ed.), *Indonesia dalam Arus Sejarah, jilid I* Prasejarah (eds. H.T. Simanjuntak dan H. Widyanto). Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Tjandrasmita, U. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. KPG Kompas, Jakarta.